

**Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak  
Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
(Corporate Social Responsibility)**

**Oleh: Ardi Armandanu**

**Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II : Dasrol, SH.,MH**

**Alamat: Jalan Kembang Harapan Gang Seliangguri No. 11 D Kel. Cintaraja, Kec. Sail  
Pekanbaru - Riau**

**Email: ardiarmandanu@gmail.com**

***Abstract***

*Since 2007, indonesia becoming one thing only country requiring implementation of csr, with its approved law no. 40 year 2007 on limited liability company and is added to the law no. 25 year 2007 on investment. But since then was, obligations with sanctions, only limited word not much implies. Confusion legislators in formulating sanctions provisions, being great opportunities for the company to not carry out corporate social responsibility. Normatively, there is no rule of law that governs about csr implementation mechanism in one rule of law.*

*Interest thesis writer namely; first, to determine the setting of sanctions to companies that do not run the social responsibility of companies in indonesia; second, to determine the mechanism of sanctions to the company that are not running a corporate social responsibility (corporate social responsibility).*

*What kind of legal research used writer is a kind of normative legal research or legal research literature. from the findings of researchers, there are two main thing that can be inferred. First, there is a lot of laws and regulations governing corporate social responsibility, namely the law of state owned enterprises (soes), law investment law corporate law, law of mineral and coal, and many others, however of the many rule of law which set of corporate social responsibility (csr) there is inconsistency makers act are the terms of use csr that would potentially lead to multiple interpretations in practice, then not all the laws that set about csr also includes rules sanctioned therein, and those laws yang the rules include sanctions, also does not explain how the mechanism of sanctions to be implemented. Second, the mechanism of sanctions can only seen in regulation (regulation csr), the automatic mechanism of sanctions is not set in size and only limited to local areas that govern only. Bylaw csr even this will not be able to walk without a forum its function as containers container aspirations, composer planning, also serves to conduct monitoring and evaluation of the implementing csr, as well as provide recommendation results evaluation report addressed to the head of the region is to review furthermore, the regional administrations can be present the or precisely memberian sanctions*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan aktivitas perusahaan memiliki kontribusi positif maupun negatif. Tersedianya lapangan kerja, dihasilkannya produk barang dan jasa, serta adanya insentif pajak bagi pendapatan negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya. Namun di satu sisi, eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan, baik perusakan maupun pencemaran lingkungan telah mematikan sumber pencaharian masyarakat, insentif pajak yang diberikan perusahaan tidak serta merta dapat langsung dirasakan manfaatnya, diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, sehingga atas dasar permasalahan tersebut penting kiranya memunculkan suatu konsep tentang tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang dikenal dengan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Melihat fenomena ini, Pemerintah lalu hadir antara legislatif dan eksekutif yang kemudian melahirkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang didalamnya mengatur tentang CSR. Namun, hadirnya UU ini justru menimbulkan reaksi keras dari para pelaku dunia usaha dengan mengajukan *yudisial review*, khususnya terhadap ketentuan pasal 74 dan penjelasannya, yang mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan CSR. Tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya. Penolakan ini memberikan angin segar terhadap kepastian hukum bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tetaplah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga apabila perusahaan tidak melaksanakannya maka wajib dikenakan sanksi seperti telah diwajibkan dalam uupt.

Namun, sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 ditambah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL PT). Tidak ada satupun kejelasan mengenai sanksi apa yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan csr. Ketentuan penerapan sanksi

yang diatur dalam pasal 7 PP TJSL PT maupun pasal 74 ayat (3) UUPD semua dilimpahkan kepada Peraturan perundang-undangan terkait..

Hal ini yang masih perlu ditinjau kembali bahwa apakah benar peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana yang dimaksud telah dapat dan siap untuk menjawab permasalahan ketentuan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

Dalam ilmu hukum, sanksi bukanlah sesuatu yang esensial. Sanksi merupakan elemen tambahan. Unsur esensial di dalam hukum adalah bahwa aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga aturan tersebut mempunyai sifat mengikat.<sup>1</sup> Benar memang, dengan diterimanya aturan hukum, maka dengan sendirinya hukum itu akan ditaati. Namun, yang harus diingat bahwa kenyataan diterima atau tidaknya sebuah aturan hukum tergantung pada kesadaran hukum yang dimiliki oleh para subjek hukum (*person* dan *rechtsperson*). Lantas apakah kita harus menunggu sampai para subjek hukum itu sadar. Maka hadirnya negara harus mampu memberikan ketegasan, ketegasan untuk memberi kepastian, kepastian agar terlindungnya sebuah kepentingan, yaitu kepentingan rakyat banyak.

Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir, Karmila Sari menyampaikan bahwa selama ini pemerintah tidak memiliki data lengkap pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Provinsi Riau.<sup>2</sup> Tidak adanya data tersebut menyebabkan tidak berjalannya pengawasan oleh pemerintah, hal inilah yang juga menjadi hambatan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan judul: **“Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)”**.

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 9.

<sup>2</sup>Riau Pos Hari Sabtu Tanggal 16 April 2016, hlm. 28.

## B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

### 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

#### a. Bagi penulis

- 1) Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

#### b. Bagi dunia akademik

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tanggung jawab sosial perusahaan pada khususnya, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

#### c. Bagi instansi

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan kepada pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk dapat memberikan perhatian khusus dalam hal koordinasi program, pelaksanaan pengawasan, serta transparansi pelaporan, dan bertindak secara tegas dalam hal pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Ko-Eksistensi

Teori ini diperkenalkan oleh Firdaus dalam tulisannya yang berjudul "*Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas*". Teori ini menyatakan bahwa tidak akan ada perusahaan tanpa adanya masyarakat. Masyarakat dan perusahaan seperti dua sisi mata uang, tak akan ada orang yang mendirikan perusahaan tanpa ada masyarakat sebagai pasar bagi produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.<sup>3</sup>

Sony keraf mengutarakan perusahaan tidak berdiri sendiri, ia tumbuh dan berkembang dan sebaliknya hancur juga oleh karena masyarakat.<sup>4</sup> Tidak ada perusahaan baik besar maupun kecil yang tidak membutuhkan kolaborasi sosial.<sup>5</sup> Perusahaan sangat ditentukan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan csr kepada masyarakat.

Perkembangan ruang lingkup CSR, baik secara internal maupun eksternal adalah respon hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, karena sejatinya perusahaan

---

<sup>3</sup>Firdaus, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.1 September 2014, hlm. 180.

<sup>4</sup>A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 50 dalam Firdaus, *Ibid*, hlm. 180-181.

<sup>5</sup>Francis Fukuyama, *Trust: Social Virtues and The Creation of Prosperity*, diterjemahkan oleh Ruslani, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2007, hlm. 7 dalam Firdaus, *Ibid*, hlm. 181.

adalah ko-eksistensi masyarakat. Keberadaan perusahaan sejatinya karena keberadaan masyarakat. Perusahaan tidak akan menyediakan atau menawarkan barang/jasa yang diperdagangkan tanpa ada masyarakat yang membutuhkan.<sup>6</sup>

## 2. Konsep *Trible Bottom Line*

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus berpijak pada konsep *trible bottom line*, yaitu selain aspek finansial juga peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan.<sup>7</sup>

Konsep *trible bottom line* ini diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul “*Cannibals With Forks: The Tribble Bottom Line In 21<sup>st</sup> Century Business 1998*”.<sup>8</sup>

Menurut konsep ini jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka harus memperhatikan “3P” yaitu: *profit, people, dan planet*, dimana selain kewajibannya untuk memperoleh keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat penuh pada kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam kelestarian lingkungan (*planet*).

Ketiga dimensi ini dalam konsep daya saing menunjukkan bahwa penerapan CSR yang secara simultan membidik ketiga bidang ini akan menjamin terwujudnya manfaat keberlanjutan bagi perusahaan maupun masyarakat. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah dalam menyediakan layanan publik atau infrastruktur, namun kegiatan CSR terutama dinegara berkembang,

berpotensi memberi sumbangan pada percepatan pertumbuhan perekonomian mikro.<sup>9</sup>

## 3. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare-Rechtstate*)

Teori negara hukum kesejahteraan (*welfare-rechtstate*) merupakan perpaduan atau campuran dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>10</sup>

Menurut burkens, negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>11</sup> Adapun konsep negara kesejahteraan adalah menempatkan peran negara tidak hanya sebatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *nachtwakerstaat*, akan tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare-rechtstate*) tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga negaranya. Berdasar tujuan negara tersebut, maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan sosial khususnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Teori ini memberikan penekanan bahwa negara harus hadir dalam membuat pengaturan yang secara jelas dan spesifik, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta memberikan tindakan tegas atas tak terlaksananya tanggung jawab sosial

<sup>6</sup>Firdaus, “Corporate Social Responsibility: Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm. 19-20.

<sup>7</sup>Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

<sup>8</sup>Hendrik Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. ix.

<sup>9</sup>Sri Urip, *Strategi CSR; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk peningkatan daya saing perusahaan di Pasar Negara Berkembang*, Literasi Imprint, Tangerang, 2014, hlm. 111.

<sup>10</sup>Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. xi.

<sup>11</sup>M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul dan Fungsi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, hlm.1.

<sup>12</sup>*Ibid.*

perusahaan di lapangan, sebagai wujud nyata fungsi negara dalam bidang perekonomian, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Teori Jenjang Norma (*Stufen Theory*)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*stufentheory / stufenbau des rechts theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *general theory of law and state* oleh Anders Wedberg.

Dalam teori jenjang norma tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri karena norma hukum yang satu menentukan cara untuk membentuk norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi norma lainnya tersebut.<sup>13</sup>

Teori jenjang norma (*stufen theory*) digunakan untuk memberikan acuan pemikiran tentang ketentuan bahwa aturan ketentuan penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana telah diatur dalam UUPT dan PP TJSL PT, namun terkait dengan mekanisme belum diatur secara jelas, oleh karena itu teori dapat digunakan untuk merekomendasikan penulis mengkaji peraturan-peraturan dibawahnya tentang ada tidaknya pengaturan tentang mekanisme penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan acuan pada asas "*lex special derogat lex generalis*" yaitu aturan perundang-undangan yang khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.

#### A. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pijakan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis

memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.<sup>14</sup>
2. Pembangunan Berkelanjutan menurut *World Commission On Environment And Development* (WCED) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>15</sup>
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>16</sup>
4. Sanksi adalah ancaman hukuman yang merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, dan norma-norma hukum.<sup>17</sup>
5. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.<sup>18</sup>
6. Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda

<sup>14</sup>Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>15</sup>Totok Mardikanto, *Op.Cit.* 15.

<sup>16</sup>Gunawan Wijaya dan Yemima Ardi Pranata, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 7

<sup>17</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual Press, 2007, hlm. 436.

<sup>18</sup>Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, 1973 yang di terjemahkan oleh Soemardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 155



yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.<sup>19</sup>

7. Perseroan adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa.<sup>20</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup:<sup>21</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Dalam penelitian ini penulis mengkaji terhadap sinkronisasi hukum mengenai bagaimana pengaturan sanksi tanggung jawab sosial perusahaan didalam peraturan perundang-undangan, selain itu penelitian ini juga mengkaji mengenai pelaksanaan penerapan sanksi tanggung jawab sosial perusahaan.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>22</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan

perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup> intinya bahwa bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu:

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus besar bahasa indonesia (kbbi) dan kamus bahasa inggris-indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan:

- a. Perpustakaan Wilayah Riau;
- b. Perpustakaan Universitas Riau;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

### 4. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara

<sup>19</sup>Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

<sup>20</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia*, Bandung, 2012, hlm. 2.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 24.

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 141.

penelitian yang menghasilkan atau deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>24</sup> Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

Yang pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatan oleh teori-teori.<sup>25</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perusahaan**

Sejak dicabutnya istilah pedagang dan bukan pedagang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maka muncul istilah perusahaan.<sup>26</sup> Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam kitab undang-undang hukum dagang (kuhd), namun kuhd sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.<sup>27</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik yaitu perusahaan perseorangan<sup>28</sup> atau perusahaan persekutuan.<sup>29</sup> Dilihat dari status pemilik, perusahaan bisa dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan bila dilihat dari bentuk hukumnya perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.<sup>30</sup>

Menurut Ulya Kencana, pengertian badan hukum ialah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Ia juga menambahkan bahwa badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berbunyi:

“perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

<sup>25</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

<sup>26</sup> Berdasarkan Stb. 1938 No.276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, Bab Kesatu tentang Pedagang dan perbuatan dagang atau pasal 2-5 KUHD dinyatakan dihapus.

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia; Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 67.

<sup>28</sup> Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan ini. Pada umumnya masyarakat yang ingin menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). <https://materimahasiswa.hukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/perusahaan-perorangan.html>, diakses, tanggal 19 Juli 2016.

<sup>29</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 98.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ulya Kencana, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR): (Kajian Hukum Ekonomi Indonesia)”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari 2008, hlm. 48.

hukum (*rechtspersoon / legal person / legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Merupakan persekutuan modal
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha
- d. Memperoleh pengesahan oleh pemerintah

## **B. Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan**

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pertama kali dipublikasikan oleh *The World Conservating Strategy* (WCS) pada tahun 1980 di Gland, Swiss dan menjadi pusat pemikiran untuk pembangunan dan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh *World Commission On Environment And Development* (WCED) yaitu komisi dunia tentang lingkungan dan pembangunan yang dikenal dengan Komisi Brundtland (1987), yang diketuai oleh Ny. Gro Harlem Brundtland (Perdana Menteri Norwegia).<sup>32</sup> Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>33</sup>

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang luas karena menggabungkan faktor ekonomi, keadilan sosial, ilmu lingkungan, manajemen bisnis, politik, dan hukum. Ini adalah konsep dialektik seperti keadilan, demokrasi, dan konsep sosial penting lainnya. Pembangunan berkelanjutan juga tidak bisa hanya diserahkan kepada regulator pemerintah dan pembuat kebijakan, namun juga membutuhkan peran serta dari para pelaku industri.<sup>34</sup>

Banyak langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, antara lain, strategi pembangunan berkelanjutan versi *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD, 2001). Menurut konsep OECD, pembangunan berkelanjutan

dilaksanakan dengan cara: *pertama*, dengan menelaah pandangan-pandangan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap isu-isu prioritas yang diperlukan dalam menentukan strategi pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, memprakirakan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh dari implementasi strategi pembangunan yang telah dirumuskan.<sup>35</sup>

Perlu dikemukakan disini bahwa langkah-langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak harus dilaksanakan dengan cara yang kaku (*rigid*). Sebab, dalam prakteknya banyak diantara langkah-langkah tersebut perlu dilaksanakan secara bersamaan dan beberapa dilaksanakan ketika muncul kesempatan.<sup>36</sup>

Kaitan CSR dengan pembangunan berkelanjutan adalah bisnis yang berkelanjutan (*business sustainability*) bukan sekedar keuntungan yang bersifat jangka pendek tetapi beralih kepada kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Saprudin Hamdani dan rekan dari masyarakat agrobisnis dan agroindustri Indonesia (mai) mengatakan bahwa program CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk turut serta dalam program pemberdayaan masyarakat sebab CSR bukan hanya program bagi-bagi kue tetapi harus menjadi sebuah program yang berkesinambungan.<sup>37</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>38</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang

<sup>32</sup> Bruce Mitchell, *et. al.*, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

<sup>33</sup> Totok Mardikanto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>34</sup> Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2014, hlm. 34.

<sup>35</sup> Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 37.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> <http://konsillsm.or.id/aturan-csr-yang-jelas-sangat-diperlukan/> diakses, tanggal, 27 Juli 2016.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.



berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>39</sup>

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum tidak hanya menyangkut perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Sedangkan, pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan pada beberapa tanggung jawab sosial secara simultan. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ada 3 macam jenis-jenis tanggung jawab perusahaan, yaitu:

1. Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibility*)
2. Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*)
3. Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Pertanggungjawaban manusia secara hukum memiliki dua aspek hubungan, yaitu pertanggungjawaban dengan sesama manusia dan alam semesta (horizontal), serta pertanggungjawaban kepada penciptanya (vertikal).<sup>40</sup> Dalam peraturan perundang-

undangan, tanggung jawab hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bidang hukum yaitu:

#### a. Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum administrasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dapat diberikan oleh badan atau pejabat pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan yang telah dilanggarnya. Secara teoritis, penerapan sanksi administrasi tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang tindakan pemerintah (*bestuurshandelingan*). Tindakan pemerintah meliputi semua perbuatan yang dilakukan oleh organ administrasi dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah.<sup>41</sup>

Secara garis besar tindakan pemerintah digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: (1) tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yaitu tindakan-tindakan yang menurut hakikatnya diarahkan pada suatu akibat hukum tertentu, dan (2) tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan inisiatif dari pemerintah.<sup>42</sup>

Berhubung bahwa kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan adalah pada perusahaan yang menjalankan usaha dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, maka aturan sanksi administratif dapat mengacu kepada peraturan menteri lingkungan hidup nomor 2 tahun 2013 tentang jenis jenis sanksi administratif. Adapun jenis-jenis sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan pemerintah;
- 3) Pembekuan izin lingkungan;
- 4) Pencabutan izin lingkungan; dan
- 5) Denda administratif.

#### b. Hukum Perdata

Menurut ilmu hukum perdata, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dipertanggungjawabkan

<sup>39</sup> <http://digilib.unila.ac.id> diakses pada Tanggal 10 Juli 2016.

<sup>40</sup> Ulya Kencana, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR): (Kajian Hukum Ekonomi Indonesia)", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari 2008, hlm. 45-46.

<sup>41</sup> Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, hlm.15.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 16.

atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain.<sup>43</sup> Subekti menyebutkan bahwa suatu perbuatan, menurut perkembangan pemikiran ilmu hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribadi maupun harta benda orang lain.<sup>44</sup> Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi, lazimnya dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan.<sup>45</sup>

Jika dilihat dalam hukum perdata, pertanggungjawaban hukum perdata dari perseroan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdsdaad*), sebagaimana diatur dalam pasal 1365 kuh perdata yang berbunyi:

*“setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut”*

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdsdaad*) menurut pasal 1365 kuh perdata ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;
- 2) Terdapatnya kesalahan pada pelaku;
- 3) Timbul kerugian;
- 4) Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Pasal tersebut merupakan formula yang memuat prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada adagium (*pepatah*) bahwa tidak ada

pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan (*no liability without fault*).

Menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum adalah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mrngontrol dan mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>46</sup>

Berdasarkan pasal 1656 kuh perdata (*burgerlijk wetboek*) terdapat pembatasan mengenai tanggung jawab perusahaan yang dilakukan oleh para pengurusnya yang menyatakan bahwa:

*“segala perbuatan untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah.”*

Hal ini menjelaskan secara tegas bahwa tanggung jawab perbuatan badan hukum, dimana orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya, yaitu organ badan hukum tidak dapat berbuat sewenang-wenang, sebab tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan tidak menjadi tanggung jawab badan hukum akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ, terkecuali jika apa yang dilakukan itu menguntungkan perusahaan.

### c. Hukum Pidana

Berdasarkan sanksi yang diatur dalam pasal 10 kuhp menyebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan yaitu:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan.
- 4) Pidana denda.

<sup>43</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 306.

<sup>44</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1975. Dalam N.H.T. Siahaan, *ibid*.

<sup>45</sup> Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak laut*, Alumni, 1981 Dalam N.H.T. Siahaan, *ibid*.

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.

Namun pidana yang dapat dikenakan pada korporasi berdasarkan pasal 10 kuhp hanya pidana denda saja. Seperti yang diungkapkan oleh barda nawawi arief walaupun korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat bertindak sesuai dengan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya namun pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa pengecualian, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Dalam perkara yang menurut kodrat tidak dapat dilakukan oleh korporasi, seperti perkosaan dan sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi seperti pidana penjara atau pidana mati.

Perusahaan (*Corporate*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*), dan pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan yang harus mempertanggung jawabkannya.

## **BAB**

### **BAB III**

#### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **A. Pengaturan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Di Indonesia.**

Pengaturan kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah banyak diatur dalam aturan perundang undangan, begitu juga penegasan tentang adanya sanksi. Bagi perusahaan negara baik bumh maupun bumd telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. Per-07/MBU/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Bagi kalangan dunia usaha diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dilengkapi dengan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau. Serta masih banyak aturan lainnya.

Namun dari banyaknya aturan CSR dalam peraturan perundang undangan ada beberapa catatan peneliti mengenai hal ini:

1. Ketidak-konsistenan penggunaan istilah CSR, terdapat beragam istilah yuridis seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT, tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM, Pembinaan Usaha Kecil/Koperasi Dan Pembinaan Masyarakat dalam UU BUMN, dan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam UU Minerba. Ketidak-konsistenan penggunaan istilah dapat dipandang sebagai kelemahan karena potensial menimbulkan multitafsir dan secara praktis setidaknya menyulitkan untuk mengidentifikasi pengaturan csr.
2. Tidak semua perundang-undangan mengatur persoalan sanksi bagi perusahaan yang melanggar kewajiban csr, walaupun ada masih terdapat masalah yuridis berupa tidak adanya alternatif sanksi selain sanksi administrasi guna membantu menegakan norma. Ada beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya ialah:
  - a. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 34 yang menegaskan adanya sanksi administratif yaitu berupa:
    - 1) Peringatan tertulis;

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 1990, hlm. 37

- 2) Pembatasan kegiatan usaha;
  - 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- b. Uu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 105 ayat (2) yang menegaskan adanya sanksi administratif yaitu:
- 1) Peringatan tertulis;
  - 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - 3) Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

## **B. Mekanisme Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).**

Mekanisme penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) tidak diatur dalam undang undang terkait, namun mekanisme ini dapat dilihat dalam Perda Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, yang di buat sebagai pengisi kekosongan hukum dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012 yaitu dimulai dengan dibentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Forum TJSP) yang akan mewadahi semua pemangku kepentingan baik dari Pemerintah, DPRD, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk duduk bersama menyusun program.

Pelaksanaan program ini kemudian diawasi diawasi dan dievaluasi oleh SKPD-SKPD terkait yang kemudian menyampaikan laporan kepada Forum TJSP, dan Forum TJSP ini akan melanjutkan laporan itu kepada BPMP (Badan Penanaman Modal Dan Promosi) yang kemudian melaporkan kepada gubernur, jika laporan pelaksanaan itu baik maka gubernur dapat memberikan penghargaan, sedangkan jika pelaksanaan program itu buruk atau sama sekali perusahaan tidak berkontribusi maka

gubernur dapat memberikan sanksi yaitu sanksi administratif.

Namun saat ini pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) belum terlaksana dengan baik karena forum yang diharapkan menjadi wadah bagi semua pemangku kepentingan dan akan mampu menjawab semua permasalahan csr ternyata di Provinsi Riau maupun Indonesia secara keseluruhan belum terbentuk.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah banyak diatur dalam aturan perundang undangan, begitu juga penegasan tentang adanya sanksi. Namun dari banyaknya aturan CSR dalam peraturan perundang undangan tidak adanya kejelasan tentang penggunaan istilah CSR, hal inilah yang dapat menimbulkan multitafsir dan secara praktis setidaknya menyulitkan untuk mengidentifikasi pengaturan csr. Lalu dari banyaknya aturan perundang-undangan tersebut hanya ada 2 (dua) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi csr yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
2. Mekanisme penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) tidak diatur dalam undang undang terkait, namun mekanisme ini dapat dilihat dalam Perda Provinsi Riau dan dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau yang di buat sebagai pengisi kekosongan hukum dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012 .

## B. Saran

1. Perlu adanya suatu aturan perundang undangan yang secara khusus mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, agar tercipta sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Diperlukannya kerjasama semua pihak baik dari perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk ikut serta dalam membentuk Forum CSR, di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota, yang terintegrasi dengan Forum CSR di tingkat nasional, agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiq, Bachrul, 2013, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Asdak, Chay, 2014, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Asyhadie, Zaini, 2008, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility Dari Volunteer Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan*

*Indonesia; Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kelsen, Hans. 2007, *General Theory Of Law And State*, 1973 yang di terjemahkan oleh Soemardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

Karim, M. Rusli, 1997, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul dan Fungsi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Lubis, Solly, 1990, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Mardikanto, Totok, 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung.

Marzuki, H.M.Laica, 1995, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar (sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Hassanuddin University Press, Ujung Pandang.

Mitchell, Bruce et. al., 2010, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nadapdap, Binoto, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Permata Aksara, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.



Saliman, Abdul R, 2011 *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.

Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Solihin, Ismail , 2009, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta.

Sri Imaniyati, Neni, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Untung, Budi , 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta.

Urip, Sri, 2014, *Strategi CSR; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk peningkatan daya saing perusahaan di Pasar Negara Berkembang*, Literasi Imprint, Tangerang.

Wijaya, Gunawan dan Yemima Ardi Pranata, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.

## B. Disertasi

Firdaus, “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia

(Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Di Provinsi Riau)”, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.

## C. Jurnal/Kamus/Makalah

Firdaus, 2010, “*Corporate Social Responsibility: Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat*”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi. I, No. 1, Agustus.

Firdaus, 2012, “Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I, No. 1, November.

Firdaus, 2014, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.1 September.

Lestari Wuryanti, 2013, “Tinjauan Tentang Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati, Vol. 2, No. 2, Desember.

Prajogo, Soesilo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual Press.

Syahrul, et. al., 2000, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta.

Ulya Kencana, 2008 “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR): (Kajian Hukum Ekonomi Indonesia)”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari.

Yossi Niken Respati, 2012, “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Perangkat Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Artikel Pada *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. XI, No. 3, Maret.

#### **D. Majalah/Buletin/Surat Kabar**

*Riau Pos*, Tanggal 16 April 2016.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. Per-07/MBU/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008

#### **F. Website**

[Http://pustakabakul.blogspot.co.id/2013/04/teori-triple-bottom-line.html](http://pustakabakul.blogspot.co.id/2013/04/teori-triple-bottom-line.html), diakses, tanggal 2 Maret 2016.

[Https://m.facebook.com/InfoTeknikSipil/posts/471590749603617](https://m.facebook.com/InfoTeknikSipil/posts/471590749603617), diakses, tanggal, 10 Mei 2016.